

# **BAB I**

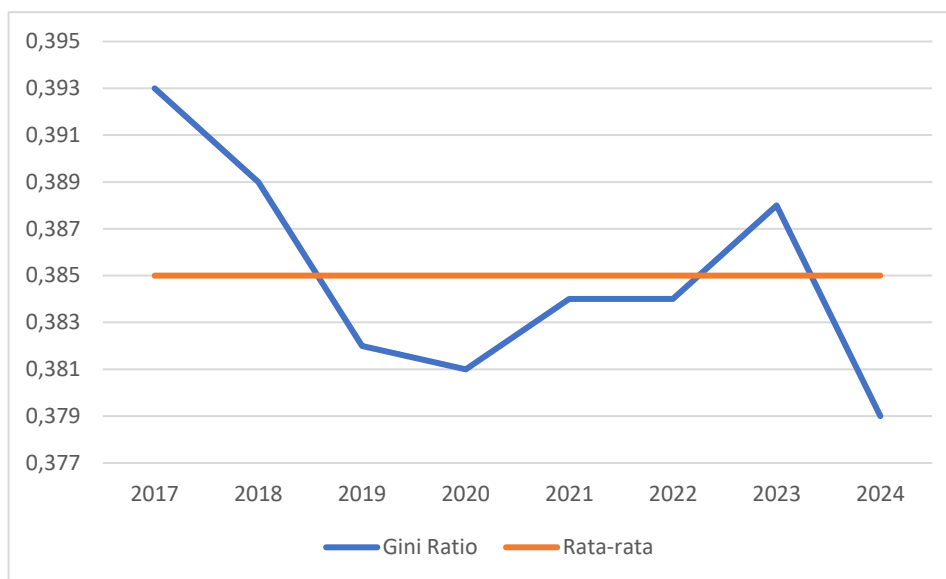
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada umumnya setiap negara mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang sama. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memperhatikan tingkat distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan telah lama menjadi perhatian dalam perekonomian. Permasalahan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih belum terselesaikan, meskipun pemerintah telah berupaya berbagai cara untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, namun masih banyak daerah yang ketimpangan pendapatannya tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah realitas yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Hal ini menjadi permasalahan penting yang harus diatasi melalui berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai aspek peningkatan pemerataan pendapatan (Wibowo, 2016).

Ketimpangan distribusi pendapatan yaitu adanya perbedaan penerimaan antara individu atau kelompok masyarakat yang menyebabkan jarak kesejahteraan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah semakin melebar. Dalam konteks pembangunan wilayah, daerah yang tertinggal cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan akibat keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan sumber daya strategis lainnya. Ketidakseimbangan kemampuan antar daerah tersebut pada akhirnya memperbesar disparitas pendapatan nasional dan menunjukkan bahwa

proses pembangunan belum berlangsung secara merata di seluruh wilayah Indonesia (Rifaldo & Rejekiingsih, 2024). Untuk melihat perkembangan ketimpangan pendapatan di Indonesia secara lebih jelas, dapat diperhatikan tren nilai *Gini Ratio* pada periode 2017 hingga 2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2025)

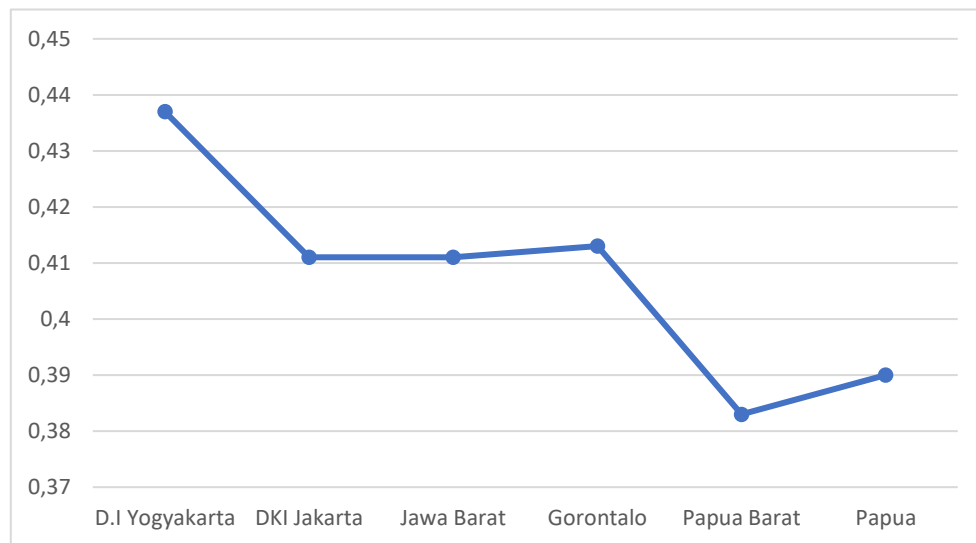
**Gambar 1.1 Nilai *Gini Ratio* Indonesia dan rata-rata *Gini ratio* Indonesia periode 2017-2024 (indeks 0-1)**

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, *Gini Ratio* Indonesia selama periode 2017-2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi, dengan tingkat ketimpangan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,393. Menurut Akhmad & Barabasi (2025), tingginya ketimpangan pada awal periode tersebut dipengaruhi oleh faktor struktural seperti kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi. Sementara itu, tingkat ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2024 dengan nilai *Gini Ratio* sebesar 0,379. Penurunan ketimpangan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan nasional. Menurut Mulyadi (2018), menyatakan bahwa penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok berpendapatan rendah turut berperan dalam memperbaiki distribusi pendapatan, sehingga ketimpangan

pendapatan mengalami penurunan pada periode terakhir. Dengan demikian, variasi nilai *Gini Ratio* selama periode tersebut mencerminkan pengaruh dinamika pembangunan, kondisi ekonomi, serta implementasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan memiliki keterkaitan erat dengan dinamika pembangunan ekonomi yang dapat dianalisis menggunakan kerangka Teori Kurva Kuznets. Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan tidak bersifat statis, melainkan mengalami perubahan seiring dengan tahapan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonominya yang belum merata. Namun, pada tahap pembangunan selanjutnya, ketimpangan tersebut akan menurun ketika proses pembangunan telah memasuki fase yang lebih maju dan manfaat pertumbuhan ekonomi mulai terdistribusi secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat (Hermawan & Taher, 2025).

Ketimpangan pendapatan di Indonesia tidak hanya tercermin pada tingkat nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi ekonomi antar provinsi sebagai konsekuensi dari dinamika pembangunan yang tidak merata. Disparitas antar provinsi tersebut turut membentuk tingkat ketimpangan nasional, mengingat adanya perbedaan kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, untuk memahami ketimpangan pendapatan di Indonesia secara lebih komprehensif, diperlukan analisis pada tingkat provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola disparitas antar wilayah selama delapan tahun terakhir pada periode 2017–2024.

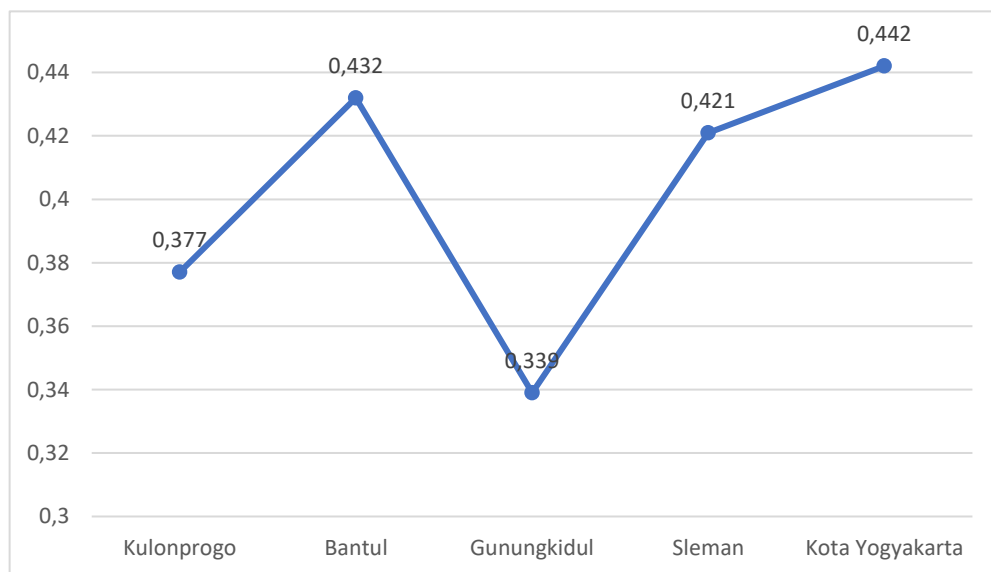


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2025)

**Gambar 1. 2 Nilai Rata-rata *Gini Ratio* menurut 6 Provinsi di Indonesia yang berada di atas rata-rata nasional periode 2017-2024 (indeks 0-1)**

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, terlihat bahwa terdapat enam provinsi di Indonesia yang memiliki rata-rata *Gini Ratio* berada di atas rata-rata nasional. Di antara keenam provinsi tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai ketimpangan tertinggi dibandingkan lima provinsi lainnya, dengan rata-rata sebesar 0,437 selama periode delapan tahun terakhir, yaitu dari periode 2017-2024. Menurut Ibnu Muharam (2022), tingginya ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan erat dengan struktur ekonomi wilayah yang didominasi oleh sektor jasa dan pendidikan, serta adanya perbedaan tingkat pendapatan yang cukup signifikan antara masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi yang pesat pada sektor-sektor unggulan belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan berbagai aktivitas ekonomi

lainnya, provinsi ini masih dihadapkan pada permasalahan ketimpangan pendapatan yang tergolong serius. Dengan demikian, tingginya capaian pembangunan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya distribusi pendapatan yang adil dan merata di seluruh wilayah serta kelompok masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut karena secara konsisten menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diolah (2025)

**Gambar 1.3 Rata-rata Nilai Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2024 (persen)**

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, rata-rata *Gini Ratio* kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017-2024 menunjukkan adanya variasi tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta dengan rata-rata *Gini Ratio* sebesar 0,443. Tingginya ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi

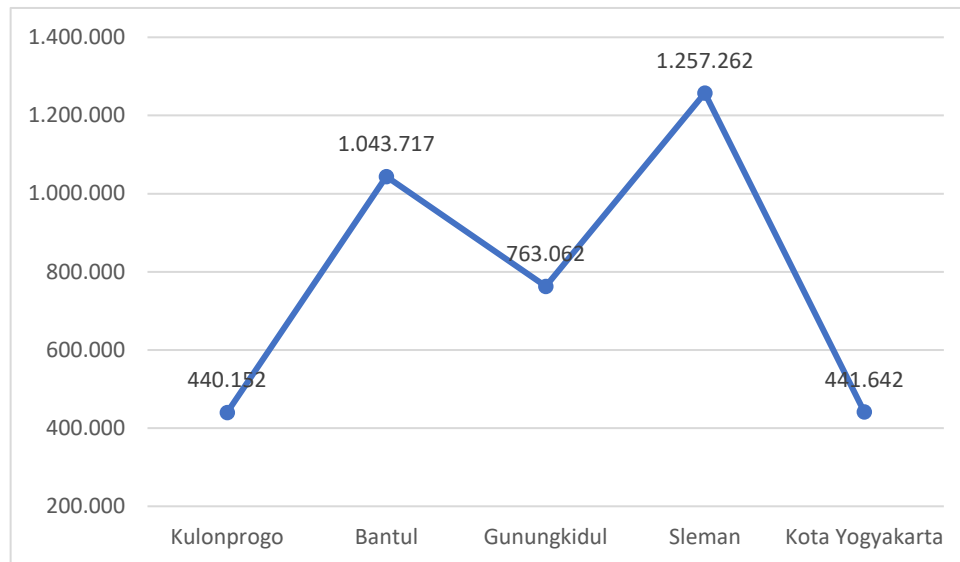
aktivitas pendidikan, pariwisata, dan sektor jasa yang berkembang pesat, namun belum diikuti oleh pemerataan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah (Rinusara, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa pesatnya pertumbuhan sektor unggulan di wilayah perkotaan tidak selalu sejalan dengan pemerataan manfaat ekonomi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan terendah dengan rata-rata *Gini Ratio* sebesar 0,341. Rendahnya ketimpangan di wilayah ini dipengaruhi oleh pola pembangunan yang relatif lebih merata di kawasan perdesaan serta adanya dukungan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM lokal, sehingga akses terhadap aktivitas ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur ekonomi berbasis perdesaan dan penguatan ekonomi lokal berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (Pinandito *et al.* 2024).

Dalam konteks perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota, jumlah penduduk menjadi faktor penting yang mempengaruhi kemampuan wilayah dalam mendistribusikan pendapatan secara merata. Pendekatan teori ekonomi kependudukan, khususnya Teori Malthus memandang ketimpangan pendapatan sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya produktif. Ketika pertumbuhan penduduk berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan wilayah dalam menyediakan sumber daya ekonomi, tekanan terhadap akses pendapatan dan kesempatan kerja menjadi semakin tinggi. Sejalan dengan asumsi bahwa tekanan demografis berperan dalam memperlebar ketimpangan pendapatan,

temuan empiris oleh Yuliana & Rosyadi (2025) juga mengonfirmasi hal serupa. Mereka menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat memperkuat ketimpangan pendapatan antar wilayah, karena kelompok masyarakat dengan kualitas sumber daya manusia yang terbatas menghadapi hambatan dalam memperoleh pendapatan yang layak, sementara kelompok dengan akses yang lebih baik terhadap modal, pendidikan, dan lapangan kerja mampu meningkatkan pendapatannya secara lebih cepat.

Di sisi lain temuan yang diungkapkan oleh Salsabila & Jaya (2023), menemukan pengaruh negatif dan signifikan. Studi tersebut berargumen bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak selalu memperburuk ketimpangan pendapatan, khususnya ketika pertumbuhan penduduk diikuti dengan adanya perluasan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang relatif merata. Fenomena pengaruh negatif ini dapat dijelaskan melalui mekanisme pemerataan pendapatan akibat meningkatnya skala ekonomi dan distribusi kesempatan kerja yang lebih luas. Dalam kondisi tersebut, penambahan jumlah penduduk mendorong peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat secara lebih merata, sehingga disparitas pendapatan antar kelompok dan antar wilayah cenderung menurun. Untuk melihat bagaimana peran faktor kependudukan dalam menjelaskan perbedaan ketimpangan pendapatan antar

wilayah, berikut disajikan data jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017–2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diolah (2025)

**Gambar 1.4 Rata-rata Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2024 (jiwa)**

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas, rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017-2024 menunjukkan perbedaan yang cukup nyata antar wilayah. Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yang dipengaruhi oleh posisinya yang strategis serta perannya sebagai pusat pendidikan yang mendorong tingginya arus migrasi masuk. Tingginya jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan kesempatan kerja dan akses ekonomi, yang berpotensi mempengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut (Subkhi & Mardiansjah, 2024).

Sebaliknya, Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian serta keterbatasan peluang investasi sebelum pembangunan

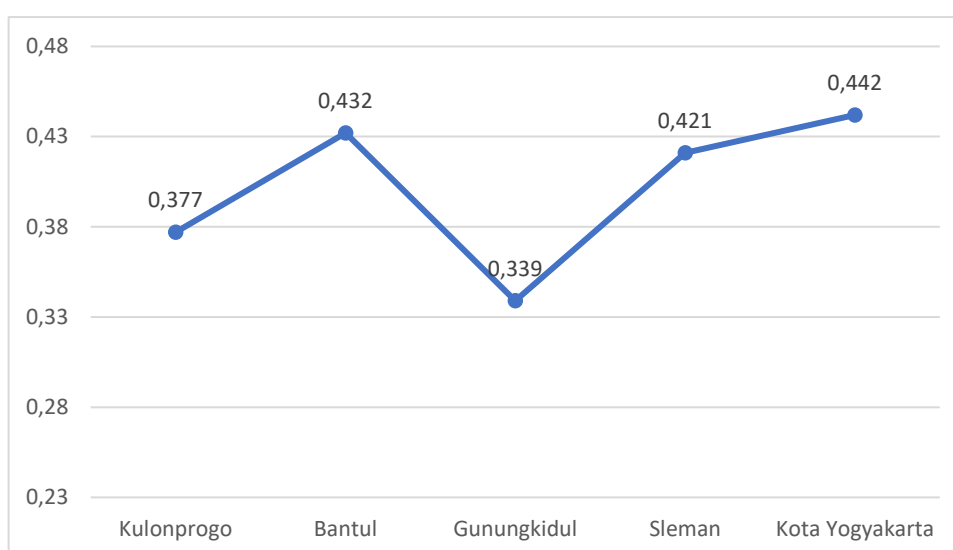
Bandara *Yogyakarta International Airport*. Jumlah penduduk yang lebih kecil di wilayah tersebut menunjukkan tekanan demografis yang relatif lebih rendah, yang dalam konteks tertentu dapat berkontribusi pada ketimpangan pendapatan yang lebih terkendali (Azzahra & Wahyuningrum, 2023). Dengan demikian, variasi jumlah penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencerminkan perbedaan tekanan demografis dan karakteristik wilayah yang berpotensi mempengaruhi ketimpangan pendapatan di masing-masing daerah.

Selain dipengaruhi oleh faktor demografi, ketimpangan distribusi pendapatan juga sangat ditentukan oleh pendidikan sebagai faktor dari sisi penawaran (*supply side*) tenaga kerja. Menurut Teori Modal Manusia, pendidikan dipandang sebagai investasi yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas individu, sehingga berimplikasi langsung pada peningkatan pendapatan. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan individu memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik dalam memasuki pasar kerja, sehingga memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Peningkatan kualitas pendidikan yang merata memungkinkan individu dari berbagai latar belakang sosial ekonomi memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Agustini *et.al.* (2023) bahwa pengembangan modal manusia melalui pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas individu, baik dari aspek keterampilan maupun kemampuan kerja, sehingga mendorong produktivitas dan memperluas peluang ekonomi.

Dukungan empiris terhadap peran pendidikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan juga menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan hasil dari Nesha Rizky Ashari *et al.* (2024) menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, yang mengindikasikan bahwa perbaikan akses dan kualitas pendidikan mampu menekan disparitas pendapatan antar wilayah. Namun, hubungan antara pendidikan dengan ketimpangan pendapatan belum dapat disimpulkan secara pasti karena masih ditemukannya perbedaan hasil penelitian. Studi lain seperti yang dilakukan oleh Wardhana *et al.* (2019) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, yang menunjukkan bahwa kesenjangan dalam pencapaian pendidikan antar wilayah atau kelompok sosial dapat memperlebar ketimpangan distribusi pendapatan. Anomali ini dapat dijelaskan melalui kondisi di mana peningkatan pendidikan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dengan akses lebih baik, sehingga perbaikan produktivitas dan pendapatan tidak tersebar merata di seluruh masyarakat. Untuk melihat peran pendidikan dalam menjelaskan perbedaan ketimpangan pendapatan antar daerah, berikut data rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017–2024.

Berdasarkan Gambar 1.5 di bawah ini, rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017-2024 menunjukkan adanya perbedaan capaian pendidikan antar wilayah. Kota Yogyakarta tercatat sebagai wilayah dengan rata-rata lama sekolah tertinggi, yaitu sebesar 11,70 tahun. Tingginya capaian tersebut didorong oleh komitmen pemerintah daerah dalam

memperkuat sektor pendidikan melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan pengembangan lembaga pendidikan formal serta informal. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang dapat berkontribusi pada tingginya ketimpangan pendapatan apabila peningkatan kualitas pendidikan tidak diikuti oleh pemerataan akses ekonomi (Sugiyanto, 2024).



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diolah (2025)

**Gambar 1.5 Rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2024 (tahun)**

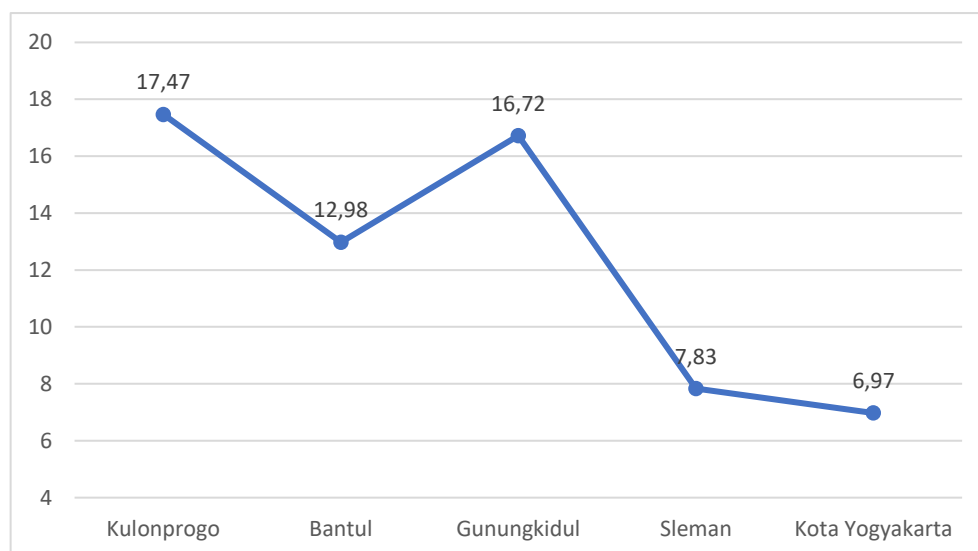
Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul mencatat rata-rata lama sekolah terendah, yaitu sebesar 7,20 tahun. Rendahnya capaian pendidikan di wilayah ini berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum merata, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi daerah masih terbatas. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kualitas modal manusia dan terbatasnya peluang kerja berpendapatan tinggi, yang dapat mempersempit kesenjangan pendapatan di dalam wilayah (Pinandito *et al.* 2024). Dengan demikian, perbedaan capaian pendidikan antarwilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencerminkan adanya

ketimpangan kualitas modal manusia yang berpotensi mempengaruhi variasi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota.

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yaitu kemiskinan. Landasan teoritis utama variabel ini dapat dijelaskan melalui Teori Kemiskinan Absolut, yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi ketika individu atau rumah tangga memiliki tingkat pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Dalam konteks ketimpangan distribusi pendapatan, teori ini menegaskan bahwa ketimpangan tidak hanya tercermin dari perbedaan tingkat pendapatan antar individu atau kelompok masyarakat, tetapi juga dari ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mencapai standar hidup minimum yang layak. Ketika distribusi pendapatan tidak merata, sebagian kecil masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sementara kelompok lainnya tertinggal pada kondisi pendapatan minimum (Rosana, 2019). Mekanisme teoretis tersebut sejalan dengan temuan empiris oleh Ardian & Prabowo (2024) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan antara tingkat kemiskinan dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Kelompok miskin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan sumber daya ekonomi. Kondisi ini menyebabkan pendapatan terakumulasi pada kelompok berpendapatan tinggi, sementara kelompok miskin tetap berada pada tingkat pendapatan yang rendah.

Hubungan antara tingkat kemiskinan dengan ketimpangan distribusi pendapatan tidak selalu bersifat searah, terdapat temuan empiris lain yang menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian oleh Dai *et al.* (2023) menunjukkan bahwa tingkat

kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variasi ketimpangan pendapatan tidak secara langsung dipengaruhi oleh perubahan tingkat kemiskinan. Kondisi ini dapat disebabkan tingkat kemiskinan yang relatif homogen, atau adanya pengaruh variabel lain yang lebih dominan, seperti pengeluaran per kapita dan kualitas sumber daya manusia, dalam membentuk pola distribusi pendapatan. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan tidak selalu mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah. Untuk melihat bagaimana kondisi kemiskinan pada tingkat wilayah serta keterkaitannya dengan variasi ketimpangan pendapatan, berikut disajikan data tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017–2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diolah (2025)

**Gambar 1.6 Rata-rata Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2024 (persen)**

Berdasarkan Gambar 1.7 di atas, tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017–2024 menunjukkan perbedaan yang

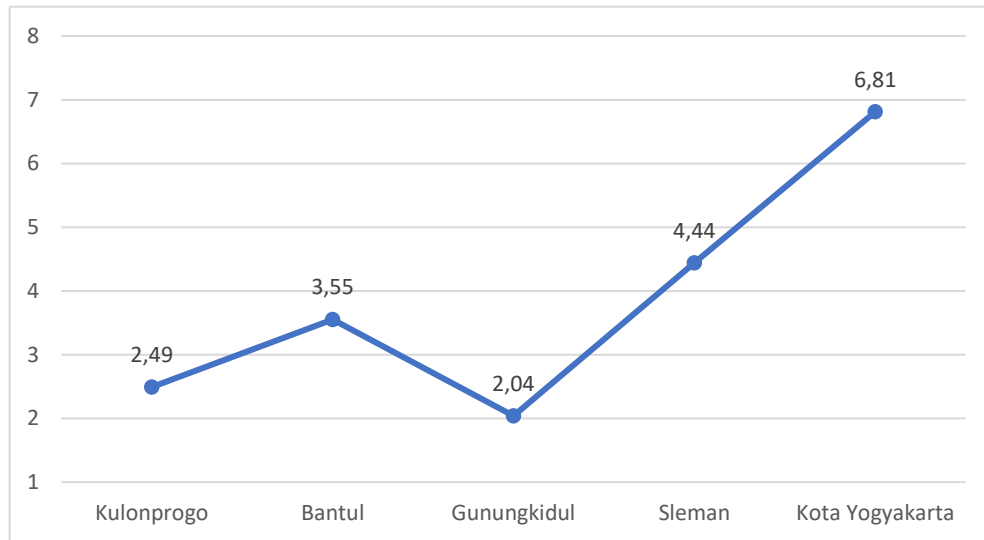
cukup jelas antar wilayah. Kabupaten Kulon Progo tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sebesar 17,47%. Tingginya tingkat kemiskinan di Kulon Progo dipengaruhi oleh keterbatasan geografis dan ekonomi yang menghambat pengembangan aktivitas produktif serta akses terhadap peluang ekonomi (Salsabilla *et al.* 2019). Sebaliknya, Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat kemiskinan yang rendah. Perbedaan tingkat kemiskinan antar wilayah ini berimplikasi pada ketimpangan distribusi pendapatan, di mana wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang besar dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut memperlebar jarak pendapatan antar kelompok masyarakat dan memperkuat ketimpangan distribusi pendapatan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain faktor jumlah penduduk, pendidikan, dan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka merupakan faktor penting yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Teori Pengangguran Klasik dalam Amrullah *et al.* (2025) ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja akan menimbulkan pengangguran yang pada akhirnya memperbesar ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena pendapatan antara kelompok masyarakat sangat ditentukan oleh posisi mereka dalam struktur ekonomi, di mana pekerja yang bergantung pada upah menjadi kelompok paling rentan ketika permintaan tenaga kerja menurun, sementara pemilik modal dan aset produktif tetap memperoleh keuntungan melalui laba dan sewa. Dengan demikian, meningkatnya pengangguran cenderung menurunkan pendapatan kelompok pekerja dan memperlebar jarak pendapatan dengan

kelompok pemilik modal, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat. Mekanisme teoretis ini sejalan dengan temuan empiris oleh studi Nesha Rizky Ashari *et al.* (2024) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk berpendapatan rendah, sementara kelompok yang telah memiliki pekerjaan dan aset ekonomi relatif tidak terdampak, sehingga ketimpangan pendapatan semakin melebar. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengangguran berperan sebagai faktor struktural yang memperbesar disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat.

Hubungan antara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan tidak selalu bersifat konsisten. Penelitian oleh Rahayu & Febriaty (2024), menyebutkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi ini dapat terjadi ketika tingkat pengangguran relatif homogen antar wilayah atau ketika pengaruh variabel lain, seperti pengeluaran per kapita dan kualitas sumber daya manusia, lebih dominan dalam membentuk pola distribusi pendapatan. Dengan demikian, meskipun secara teoretis pengangguran berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan, dampaknya dalam praktik empiris sangat bergantung pada karakteristik ekonomi dan struktur pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah. Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris yang menunjukkan bahwa pengangguran berpotensi mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi pengangguran di tingkat wilayah. Dengan demikian, berikut data tingkat

pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017–2024 sebagai dasar untuk melihat variasi pengangguran antar wilayah dan keterkaitannya dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diolah (2025)

**Gambar 1.7 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2024 (persen)**

Berdasarkan Gambar 1.7 di atas, tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Wilayah dengan tingkat pengangguran rata-rata tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta sebesar 6,81%, sedangkan tingkat pengangguran terendah di Kabupaten Gunungkidul. Tingginya pengangguran di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh dominasi sektor formal yang memiliki persyaratan keterampilan relatif tinggi sehingga tidak seluruh pencari kerja dapat terserap. Selain itu, peran Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan aktivitas ekonomi mendorong arus masuk pencari kerja yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja (Istikharoh *et al.* 2018).

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Namun, hasil empiris yang ada masih menunjukkan keterbatasan. Sebagai bukti empiris, penelitian oleh S. Dai *et al.* (2023) menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, umur harapan hidup, dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, tetapi belum memasukkan jumlah penduduk dalam model analisisnya. Padahal, perbedaan jumlah penduduk antar wilayah berpotensi menimbulkan tekanan pada pasar tenaga kerja dan akses ekonomi, yang selanjutnya berdampak pada ketimpangan pendapatan.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris dalam penelitian ketimpangan distribusi pendapatan, khususnya pada kabupaten/kota. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan disusun dengan judul: **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017–2024.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2024?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran secara bersama-sama terhadap ketimpangan distribusi

pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2024 ?

3. Faktor apakah yang dominan dalam menentukan ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2024 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2024.
3. Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2024.

### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Pada bagian ini, penulis menyajikan kegunaan hasil penelitian, baik dari segi pengembangan ilmu yang menambah pengetahuan akademik, maupun kegunaan praktis yang memberikan implikasi bagi penulis, pemerintah, dan akademisi.

#### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Menunjukkan kebaruan penelitian melalui penggabungan variabel demografi dan sosial ekonomi, yaitu jumlah penduduk, pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran, yang masih jarang diteliti secara simultan pada tingkat kabupaten/kota, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan teori-teori ekonomi pembangunan dalam menganalisis fenomena ketimpangan distribusi pendapatan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi ilmiah dalam pengembangan kajian di bidang ekonomi

pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan analisis ketimpangan distribusi pendapatan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan lokasi dan waktu penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini. Penyajian informasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tempat dan periode pengumpulan data, sehingga konteks penelitian dapat dipahami dengan jelas.

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ilmiah, peneliti menentukan lokasi penelitian untuk mengumpulkan data pokok sebagai dasar untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mendeskripsikan masalah yang diteliti, yang kemudian dirangkum menjadi kesimpulan yang relevan. Pada penelitian ini, lokasi penelitian difokuskan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai matriks acuan agar penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penelitian ini dimulai pada bulan September 2025 diawali dengan melakukan pengajuan judul kepada pihak program studi Ekonomi Pembangunan. Pelaksanaan penelitian ini melibatkan kegiatan interaktif antara peneliti dan pembimbing, dengan keterlibatan penguji

